

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas dan transparansi merupakan pilar fundamental dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba, termasuk organisasi kemahasiswaan yang beroperasi di lingkungan perguruan tinggi (Wardani et al., 2021). Prinsip tersebut tidak hanya menjadi tuntutan normatif dalam tata kelola organisasi, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap keberlangsungan organisasi (Bovens, 2007; Mardiasmo, 2018). Dalam konteks organisasi kemahasiswaan, pengelolaan dana yang bersumber dari iuran anggota, dukungan institusi perguruan tinggi, maupun bantuan eksternal menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas (Maulana & Lubis, 2020).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi terbukti berperan penting dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan anggota (Cordery & Baskerville, 2011). Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas dapat menimbulkan kesenjangan informasi, konflik internal, serta menurunkan legitimasi organisasi. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas dan transparansi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang mendukung keberlanjutan organisasi kemahasiswaan (Rodríguez et al., 2020).

Sebagai bagian dari entitas nirlaba, organisasi kemahasiswaan diharapkan mampu menyusun laporan keuangan secara sistematis dan transparan sesuai praktik akuntansi yang berlaku. Di Indonesia, penyajian laporan keuangan entitas nirlaba diatur dalam ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Meskipun penerapan standar tersebut tidak selalu

diwajibkan secara formal bagi organisasi kemahasiswaan, prinsip dasar penyajian laporan yang relevan, andal, dan dapat dipahami tetap menjadi acuan dalam praktik pelaporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba skala kecil masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan pemahaman pengurus terhadap standar akuntansi dan minimnya pendampingan teknis dari institusi induk (Tucker & Parker, 2013). Akibatnya, praktik pelaporan keuangan sering disesuaikan dengan kebutuhan administratif internal tanpa mengacu pada standar yang baku. Padahal, laporan keuangan yang transparan dan akuntabel berfungsi sebagai sarana komunikasi penting antara organisasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk anggota dan pihak institusi yang memberikan dukungan (Marshall et al., 2016).

Dalam konteks tata kelola organisasi kemahasiswaan, prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam pengelolaan organisasi mahasiswa. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia bahkan telah mengembangkan pedoman tata kelola organisasi kemahasiswaan yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam setiap aktivitas organisasi (Universitas Gadjah Mada, 2016). Dalam literatur organisasi nirlaba, penerapan prinsip *good governance* dipandang sebagai mekanisme untuk memperkuat sistem pertanggungjawaban dan meminimalkan risiko penyalahgunaan sumber daya organisasi (Cornforth, 2012).

Meskipun demikian, implementasi prinsip tata kelola pada organisasi kemahasiswaan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas pengurus, lemahnya sistem pengendalian internal, serta dinamika relasi

internal organisasi. Studi mengenai organisasi kemahasiswaan menunjukkan bahwa ketiadaan pemisahan tugas yang jelas, minimnya dokumentasi transaksi, dan tidak adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur dapat memengaruhi kualitas transparansi dalam pelaporan keuangan (Nurdiani et al., 2025). Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan laporan keuangan kehilangan fungsi substantifnya sebagai instrumen pertanggungjawaban dan hanya berperan sebagai kelengkapan administratif.

Literatur tata kelola organisasi nirlaba juga menegaskan bahwa lemahnya sistem pertanggungjawaban dan pengawasan internal dapat membuka peluang terjadinya ketidakteraturan dalam pengelolaan sumber daya organisasi (Ebrahim, 2003). Dalam organisasi berbasis anggota, kurangnya penyampaian laporan keuangan secara berkala dapat menimbulkan kesenjangan informasi antara pengurus dan anggota yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan internal organisasi (Cordery & Baskerville, 2011). Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan menjadi kebutuhan penting untuk menjaga integritas tata kelola organisasi kemahasiswaan (Julaika & Wardhani, 2024).

Organisasi kemahasiswaan daerah (ormada) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan organisasi mahasiswa pada umumnya. Selain berfungsi sebagai wadah aktivitas akademik dan organisasi, organisasi mahasiswa daerah juga berperan sebagai ruang adaptasi sosial serta representasi identitas kultural bagi mahasiswa perantauan. Literatur mengenai organisasi berbasis identitas menunjukkan bahwa komunitas mahasiswa daerah sering menjadi sistem dukungan sosial bagi anggotanya dalam menghadapi tantangan adaptasi akademik maupun sosial di lingkungan baru (Putnam, 2000; Ebrahim, 2003).

Peran tersebut menjadikan pengelolaan organisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi solidaritas dan tanggung jawab sosial internal (Sabili et al., 2023).

Karakteristik tersebut turut memengaruhi dinamika pengelolaan keuangan organisasi. Dana organisasi tidak hanya digunakan untuk kegiatan formal yang terencana, tetapi juga untuk kebutuhan sosial anggota yang bersifat situasional dan mendesak (Leunupun, 2022). Dalam organisasi berbasis komunitas, kondisi ini sering menimbulkan tantangan dalam memisahkan penggunaan dana organisasi dengan kebutuhan sosial internal apabila sistem pelaporan belum terdokumentasi secara jelas (Cornforth, 2012; Tucker & Parker, 2013). Oleh karena itu, mekanisme transparansi yang memadai menjadi sangat penting untuk mencegah munculnya kesenjangan informasi antara pengurus dan anggota.

Himpunan Mahasiswa Papua (HIMAPA) di Madura merupakan salah satu organisasi mahasiswa daerah yang beroperasi dalam konteks sosial budaya yang berbeda dari daerah asal anggotanya. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan mahasiswa Papua di perantauan, tetapi juga sebagai ruang dukungan sosial dan emosional bagi anggotanya. Dalam konteks tersebut, pengelolaan organisasi sering kali melibatkan kebutuhan sosial anggota yang bersifat sensitif dan mendesak, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi.

Pada praktiknya, pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa daerah sering dilakukan secara sederhana dan bergantung pada kapasitas pengurus yang sedang menjabat. Hal ini juga ditemukan pada beberapa organisasi mahasiswa yang berbasis komunitas daerah, di mana pencatatan transaksi keuangan masih dilakukan secara manual dan laporan keuangan belum selalu terdokumentasi

secara sistematis. Pada organisasi mahasiswa daerah seperti Himpunan Mahasiswa Papua (HIMAPA) di Madura, pengelolaan dana organisasi tidak hanya digunakan untuk kegiatan formal organisasi, tetapi juga untuk membantu kebutuhan sosial anggota yang bersifat situasional. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, terutama apabila mekanisme pencatatan, dokumentasi, serta penyampaian laporan keuangan belum dilakukan secara terstruktur.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi formal mengenai pelaporan keuangan organisasi mahasiswa dengan praktik yang terjadi di lapangan. Meskipun banyak perguruan tinggi telah memiliki pedoman mengenai akuntabilitas dan pelaporan keuangan organisasi mahasiswa (Arista, 2023), implementasinya sering menghadapi keterbatasan kapasitas teknis pengurus, mekanisme pengawasan yang terbatas, serta belum terbentuknya budaya organisasi yang menekankan transparansi dan integritas (Ebrahim, 2003; Cornforth, 2012; Nafi'ah, 2021).

Selain aspek teknis, penelitian mengenai akuntabilitas organisasi juga menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga oleh budaya organisasi, komitmen etis pengurus, serta mekanisme pengawasan internal yang konsisten (Schein, 2010). Dalam organisasi mahasiswa dengan latar belakang anggota yang beragam, sistem pelaporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan partisipasi anggota.

Meskipun kajian mengenai akuntabilitas organisasi nirlaba telah berkembang cukup luas, penelitian yang secara khusus membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada organisasi kemahasiswaan daerah

masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada organisasi mahasiswa secara umum tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi praktik tata kelola keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Himpunan Mahasiswa Papua (HIMAPA) di Madura sebagai organisasi mahasiswa daerah yang beroperasi dalam konteks sosial budaya yang khas.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada organisasi mahasiswa daerah Papua di Bangkalan (HIMAPA)?
2. Bagaimana praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa daerah Papua di Bangkalan (HIMAPA)?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada organisasi mahasiswa daerah Papua di Bangkalan (HIMAPA)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan pada organisasi mahasiswa daerah Papua di Bangkalan (HIMAPA).
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran praktik transparansi pengelolaan keuangan pada organisasi mahasiswa daerah Papua di Bangkalan (HIMAPA).

3. Untuk mengidentifikasi upaya penguatan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang dapat menjadi rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan bagi pengurus HIMAPA pada periode selanjutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor nirlaba, khususnya yang berkaitan dengan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pada organisasi mahasiswa daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian akuntansi pada entitas non-formal yang memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda dengan organisasi sektor publik formal.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengurus organisasi mahasiswa daerah dalam memperkuat praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Hasil penelitian ini sebagai referensi bagi organisasi mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan yang lebih tertib, jelas, dan mudah dipahami oleh anggota maupun pihak pemberi dana. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembina organisasi mahasiswa dalam merumuskan pedoman pengelolaan keuangan yang lebih sistematis sesuai dengan karakteristik organisasi mahasiswa daerah, serta menjadi dasar penguatan tata kelola organisasi yang lebih baik dan berkelanjutan pada masa mendatang.